



Evaluasi Penerapan SIPD Dalam Pelaporan Keuangan Di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton

Diah ¹⁾, Zainul Abidin ²⁾, La Ode Syaiful Islamy H ³⁾

¹⁾ *Study Program of Magister Administration Dayanu Ikhsanuddin University
Universitas Dayanu Ikhsanuddin*

²³⁾ *Department of Magister Administration, , Universitas Dayanu Ikhsanuddin
Email: AtikahAdiyanti@gmail.com*

ARTICLE HISTORY

Received [12 Juli 2025]

Revised [03 Desember 2025]

Accepted [16 Desember 2025]

KEYWORDS

*Evaluation, Implementation, Local
Government Information Systems,
Financial Reporting.*

*This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license*



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan evaluasi penerapan SIPD Dalam Penatausahaan Keuangan di Sekretariat daerah kabupaten Buton . Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan dari sisi konteks, sebelum SIPD, BPKAD Kabupaten Buton menggunakan SIMDA. Namun SIMDA memiliki kelemahan masih menggunakan platform offline yang menyebabkan sering terjadinya kesulitan dalam pertukaran file ataupun import-ekspor data. SIMDA juga masih memiliki keterbatasan dalam integrasi data, validasi otomatis, serta kesulitan dalam konsolidasi laporan. Berbeda dengan SIMDA, SIPD menggunakan server pusat sehingga transaksinya bersifat real time. Pada aspek input, penerapan SIPD belum maksimal dikarenakan kurangnya pemahaman sebagian pegawai (SDM) yang mengoperasikan aplikasi SIPD. Sarana dan prasarana seperti komputer atau laptop belum terpenuhi, Jaringan internet juga sering bermasalah. Penerapan SIPD dalam pelaporan keuangan juga menghadapi kenyataan ketersediaan dan alokasi anggaran terbatas. Akibatnya, minim dilakukan bimbingan teknis terkait SIPD. Pada aspek proses, pelaporan keuangan di BKAD belum sesuai rencana dan mengacu pada SOP, ini karena belum seluruh tahapan diterapkan secara konsisten, terutama dalam hal validasi lintas OPD, ketepatan waktu input, dan pemanfaatan penuh fitur SIPD. Penerapan SIPD belum tepat waktu, karena mengalami kendala-kendala akibat fitur yang belum lengkap terjadi, eror sistem, bug data mengakibatkan penyelesaian mengalami hambatan. Masih banyak pegawai yang belum mengoptimalkan fitur sistem, belum terbiasa dengan proses digital penuh, atau kembali ke cara manual saat sistem terganggu. Pada aspek produk, dalam proses pencatatan, pembukuan hingga pelaporan telah menunjukkan kemajuan namun masih banyak hambatan yakni terdapat eror sistem, duplikat data keuangan, sehingga belum menghasilkan pelaporan yang akurat, valid dan efektif secara sistem. SIPD untuk bagian pelaporan memiliki fitur baru pada pertengahan tahun 2024, sehingga terdapat beberapa fitur yang belum dipahami secara mendalam walaupun sudah diberikan modul

ABSTRACT

This study aims to describe evaluation of implementation local government information system in financial administration at Regional Secretary in Buton regency . This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data was collected using interview, observation and documentation techniques. The results showed in terms of context, before SIPD, BPKAD Buton Regency used SIMDA. However, SIMDA has the disadvantage of still using an offline platform which causes frequent difficulties in file exchange or data import-export. SIMDA also still has limitations in data integration, automatic validation, and difficulties in consolidating reports. In contrast to SIMDA, SIPD uses a central server so that transactions are real time. In the input aspect, the implementation of SIPD has not been maximised due to the lack of understanding of some employees who operate the SIPD application. Facilities and infrastructure such as computers or laptops have not been fulfilled, the internet network is also often problematic. The implementation of SIPD in financial reporting also faces the reality of limited budget availability and allocation. As a result, technical guidance related to SIPD is minimal. In the process aspect, financial reporting in BKAD has not been according to plan and refers to the SOP, this is because not all stages have been consistently applied, especially in terms of cross-OPD validation, timeliness of input, and full utilisation of SIPD features. The implementation of SIPD has not been on time, because it has experienced obstacles due to incomplete features, system errors, data bugs resulting in obstacles to completion. There are still many employees who have not optimised the system features, are not used to the full digital process, or return to manual methods when the system is disrupted. In the product aspect, the process of recording, bookkeeping and reporting has shown progress but there are still many obstacles, namely system errors, duplicate financial data, so that it has not produced accurate, valid and effective reporting in the system. SIPD for the reporting section has new features in mid-2024, so there are several features that have not been understood in depth even though they have been given modules.

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Buton, termasuk di Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai alat pengelolaan keuangan di daerah, sejak 2021. Dahulu, para pegawai BPKAD Kabupaten Buton seringkali harus menghadapi tumpukan dokumen dan berurusan dengan proses yang rumit dalam menyusun laporan keuangan. Ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga memerlukan penggunaan kertas yang berlebihan. Namun, dengan adanya SIPD, terdapat perbaikan. Laporan keuangan dapat disusun dengan lebih cepat dan efektif, karena sistem tersebut mengotomatiskan sebagian besar tugas yang sebelumnya dilakukan secara manual. Selain itu, implementasi SIPD di BPKAD Kabupaten Buton juga telah mengurangi kebutuhan akan lembur dalam pencapaian laporan keuangan. Namun begitu, Di BPKAD Kabupaten Buton terdapat, beberapa masalah dan tantangan dalam penerapan SIPD secara umum pertama, kontrol sistem pada SIPD terdapat di pemerintah pusat, sehingga memperlambat kinerja keuangan jika ada kesalahan pada penginputan di sistem SIPD. Kedua, jika ada kesalahan penerbitan SP2D, maka harus ke pusat data di Kemendagri di Jakarta untuk mengoreksi dan memperbaiki. Ketiga, kendala log in di sistem yang susah dan Lama untuk masuk kembali ke sistem SIPD.

Penerapan aplikasi SIPD di lingkup BPKAD Kabupaten Buton khususnya dalam pelaporan keuangan perlu untuk dianalisis apakah sudah berjalan ataupun mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Penilaian akan keberhasilan program yang diluncurkan perlu dianalisis bagaimana konteks, masukan, proses hingga hasil dari program tersebut dengan evaluasi program. Evaluasi program merupakan metode sistematis untuk pengumpulan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program yang dilaksanakan.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak mengkaji penerapan teknologi informasi dalam sektor publik, menunjukkan sejumlah manfaat seperti peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan layanan kepada masyarakat (Putranto, R., Andikaputra, 2022). Namun, studi-studi tersebut juga menyoroti berbagai hambatan yang dihadapi, termasuk resistensi perubahan dari pegawai, keterbatasan kemampuan teknis, dan masalah keamanan sistem. Meskipun aplikasi SIPD telah diperkenalkan sebagai solusi untuk mengatasi beberapa tantangan ini di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton, masih sedikit penelitian yang secara khusus mengevaluasi efektivitas penerapannya menggunakan model evaluasi CIPP, yang mencakup evaluasi Konteks, Masukan, Proses, dan Produk.

LANDASAN TEORI

Evaluasi Dalam Administrasi Publik

Evaluasi adalah fungsi penting dalam administrasi publik selain perencanaan dan pelaksanaan. Evaluasi dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan mengumpulkan informasi mengenai kinerja sesuatu (metode, manusia, peralatan), dimana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan. Evaluasi dapat dilakukan baik itu dalam lingkup individu, kelompok, lingkungan kerja, dan lain sebagainya.

Dalam evaluasi terdapat standar, tolok ukur atau kriteria, sehingga mengevaluasi adalah melaksanakan upaya untuk mengumpulkan data mengenai kondisi nyata sesuatu hal, kemudian dibandingkan dengan kriteria agar dapat diketahui seberapa jauh atau seberapa tinggi kesenjangan yang ada antara kondisi nyata tersebut dengan kriteria sebagai kondisi yang diharapkan (Arikunto & Jabar, 2009). Evaluasi adalah proses penggambaran dan penyempurnaan informasi yang berguna untuk menetapkan alternatif. Hasil Evaluasi bisa memberi keputusan yang profesional. Evaluasi didasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam mengambil keputusan baik secara kuantitatif maupun kualitatif (Asrul & Saragih, 2022).

Sedangkan Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Ada beberapa pengertian tentang program sendiri. Dalam kamus (a) program adalah rencana, (b) program adalah kegiatan yang dilakukan dengan seksama. Melakukan evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan (Arikunto & Jabar, 2009). Arikunto & Jabar (2009), mengatakan evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan telah terealisasi. Selanjutnya menurut Evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang secara kualitatif (Moleong, 2017). Untuk menjelaskan evaluasi penerapan SIPD Dalam pelaporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Buton, pendekatan deskriptif digunakan. Menurut Sugiyono (2018), informan dipilih melalui teknik purposive, yang berarti orang-orang yang terlibat langsung dan memahami penerapan SIPD dalam pelaporan keuangan di BPKAD Kabupaten Buton. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh informan tersebut. Informan tersebut harus terlibat dan memahami penerapan SIPD dalam pelaporan keuangan di BPKAD Kabupaten Buton, dapat menyampaikan data dengan tepat dan pasti tentang topik ini, dan tetap terlibat aktif pada lingkungan dan aktivitas yang berkaitan dengan penerapan SIPD dalam pelaporan keuangan di BPKAD Kabupaten Buton.

Peneliti mewawancarai Pelaksana Tugas Kepala BPKAD Kabupaten Buton, Sekretaris Dinas BPKAD Kabupaten Buton, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Bappeda Kabupaten Buton, dan Operator Teknis SIPD BPKAD Kabupaten Buton total informan 5 orang. Meskipun penulis membuat standar wawancara, tetapi juga memberi informan kebebasan untuk memberikan informasi secara luas, yang membuat wawancara semi-terbuka. Untuk memastikan data tersebut akurat, hasil wawancara ditulis dan direkam menggunakan HP, dan proses member check dilakukan.

Pengamatan yang dilakukan mencakup misalnya apakah ada peningkatan kemampuan para pegawai dalam penerapan SIPD. Ada tidaknya, sarana dan parasaran serta anggaran terkait SIPD. Apakah ada perubahan nyata dalam bentuk produk dimana SIPD memberikan dampak peningkatan keakuratan, kevalidan dan transparansi pelaporan keuangan. Dokumen yang diperiksa termasuk dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Buton, Rencana Strategis Sekretariat BPKAD Kabupaten Buton Tahun 2023- 2026, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Untuk melakukan triangulasi, kami menggunakan informasi dari berbagai sumber, seperti pernyataan Plt Kepala BPKAD dengan operator teknis SIPD. Selain itu, triangulasi metode adalah perbandingan hasil wawancara dengan pengamatan dan penelitian dokumentasi.

Analisis data menggunakan pendekatan Miles dan Huberman (Agustinova, 2015). Analisis data yang dimaksud meliputi pengumpulan, reduksi, penampilan, dan konklusi. Penyebaran data: Pengorganisasian dan penyatuan data memungkinkan pertimbangan dan tindakan. Peneliti menggabungkan kategorisasi yang relevan menjadi satu kesatuan tema dan konsep evaluasi penerapan program setelah melihat data empiris tentang hal tersebut. Data yang dianggap tidak penting dihapus. Selanjutnya, menginterpretasikan dan menganalisis kategorisasi ini, dan menampilkan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini berfokus pada pengungkapan evaluasi penerapan SIPD Dalam Pelaporan Keuangan di BPKAD Kabupaten Buton

Konteks

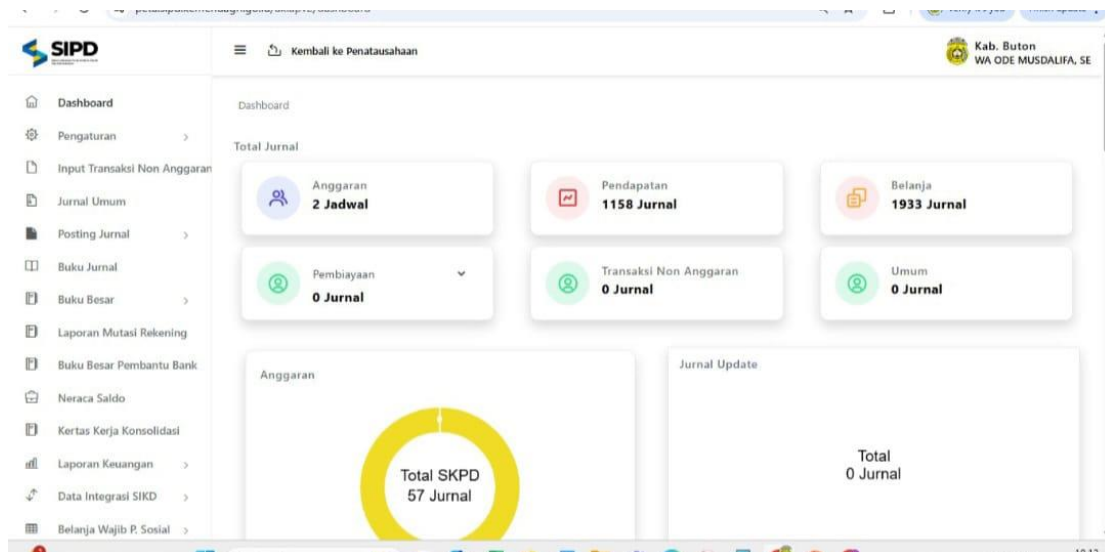
Kebutuhan yang belum terpenuhi dengan penerapan sistem SIMDA di BPKAD Kabupaten Buton yaitu masih menggunakan platform dekstop/offline sering terjadinya kesulitan dalam pertukaran file ataupun import-eksport data. Sistem manual dan SIMDA juga masih memiliki keterbatasan dalam integrasi data, validasi otomatis, serta kesulitan dalam konsolidasi laporan. Hal ini menyulitkan percepatan pelaporan, meningkatkan potensi kesalahan pencatatan, dan memperlambat pengambilan keputusan. SIPD dikembangkan karena SIMDA dan sistem manual belum mampu mencapai integrasi nasional, standarisasi pelaporan, efisiensi administratif, transparansi, dan kepatuhan regulasi secara menyeluruh. Hal ini menyulitkan pemerintah pusat dalam melakukan konsolidasi data keuangan secara tepat waktu. SIPD dirancang untuk menyederhanakan proses pelaporan, memfasilitasi sinkronisasi antar OPD, serta meningkatkan validitas dan kecepatan penyusunan laporan keuangan.

Berbeda dengan SIMDA yang menggunakan server lokal dan transaksinya yang memiliki waktu jeda, SIPD menggunakan server pusat sehingga transaksinya bersifat real time. Hal ini menyebabkan penggunaan SIPD jauh lebih efektif dan efisien terutama dalam hal download-upload data keuangan daerah. Karena transaksi SIPD bersifat real time, sehingga data keuangan lebih cepat diperoleh, lebih akurat, dan lebih valid karena data yang diperoleh adalah data paling update.

Sasaran penerapan SIPD dalam akuntansi pelaporan keuangan yang berubah di BPKAD Kabupaten Buton dan tentunya secara keseluruhan terutama dalam hal standarisasi dan sistematisasi

laporan. Proses rekonsiliasi data keuangan yang sebelumnya memakan waktu sehari-hari kini bisa dilakukan dalam hitungan jam.

Transaksi SIPD bersifat real time, sehingga data keuangan lebih cepat diperoleh, lebih akurat, dan lebih valid karena data yang diperoleh adalah data paling update. Dengan SIPD jumlah, jenis dan keterangan isi jurnal pelaporan keuangan dapat diketahui dengan jelas sebagaimana terlihat dibawah ini :



Gambar 1 Menu Pelaporan SIPD

Input

Pegawai yang ditunjuk sebagai operator SIPD sudah cukup baik dalam penggunaan SIPD, namun belum maksimal karena kurangnya BIMTEK yang dilakukan oleh pemerintah pusat sehingga masih sering mengalami kendala human error. Temuan peneliti, masih adanya pengguna SIPD yang memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaannya sehingga kurang mampu memahami penugasannya. Ditambah, pada awal penggunaan SIPD, sebagian pengguna SIPD belum menerima dengan senang hati karena sudah terbiasa menggunakan SIMDA. Pada awal peluncuran SIPD masih banyak yang belum paham dalam penggunaannya dan juga fitur-fitur yang disediakan belum lengkap sehingga sulit digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, sebagian pengguna mulai memahami penggunaan SIPD dan fitur-fitur yang disediakan pun semakin lengkap. Jadi sebagian pengguna telah memiliki peningkatan kemampuan sedang yang lain kemampuannya terbatas dalam menggunakan SIPD.

Dalam penerapan SIPD dalam pelaporan keuangan juga menghadapi kenyataan ketersediaan dan alokasi anggaran belum efektif dan tepat. Akibatnya, masih minimnya Bimtek terkait SIPD. Diharapkan kedepannya menjadi perhatian dalam penerapan SIPD dengan anggaran yang memadai dan alokasi yang efisien, pemerintah daerah dapat memprioritaskan pengeluaran untuk pelatihan pegawai, sehingga meningkatkan kinerja pelaporan keuangan, dan mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Proses

Penerapan SIPD dalam pelaporan keuangan di BKAD secara umum telah berjalan sesuai rencana dan mengacu pada SOP. Namun, belum seluruh tahapan diterapkan secara konsisten, terutama dalam hal validasi lintas OPD, ketepatan waktu input, dan pemanfaatan penuh fitur SIPD. Diperlukan peningkatan kualitas pelatihan, pengawasan internal, dan SOP teknis daerah agar implementasinya benar-benar optimal. Pelaksanaan dan penerapan SIPD dalam menyelesaikan aktivitas laporan keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan pada awal pelaksanaan mengalami kendala-kendala akibat fitur yang belum lengkap terjadi, eror sistem, bug data mengakibatkan penyelesaian mengalami hambatan.

Saat ini, baru sebagian pengguna SIPD di BKAD Kabupaten Buton sudah sanggup menangani kegiatan pelaporan keuangan secara rutin dengan cakap. Olehnya itu, dengan pelatihan yang memadai dan dukungan teknis, staf mampu menangani pelaporan berkelanjutan. Namun, perlu komitmen jangka panjang dari manajemen atau pimpinan daerah.



Sarana dan prasarana di BKAD untuk mendukung pelaporan keuangan melalui SIPD belum cukup tersedia, Laptop, komputer dan wifi banyak bermasalah sehingga pemanfaatannya belum maksimal. Tambahan pula, masih banyak pegawai yang belum mengoptimalkan fitur sistem, belum terbiasa dengan proses digital penuh, atau kembali ke cara manual saat sistem terganggu.

Hambatan yang sering dijumpai yaitu akses SIPD yang berbasis daring (web-based) sering mengalami gangguan dan operator atau pejabat pengelola keuangan di daerah masih banyak yang belum sepenuhnya memahami penggunaan SIPD, terutama dalam hal pelaporan keuangan yang memerlukan akurasi tinggi. Berbeda dengan itu, Rezkiaty dan Tenriwaru (2024) menemukan beberapa kendala dan hambatan sehingga SIPD masih banyak kendala pada beberapa pemerintah daerah. Fitur-fitur yang sepenuhnya tidak dapat diakses seperti jika ingin melihat laporan operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL Juga yang tidak kalah penting adalah respon pemerintah pusat yang dianggap lamban dalam merespon kendala yang dihadapi.

Produk

Dalam proses pencatatan, pembukuan, inventarisasi telah menunjukkan kemajuan sebagian besar data keuangan telah tercatat dan terekam secara elektronik dan terintegrasi, namun temuan peneliti masih terdapat eror sistem terdapat duplikat data keuangan, sehingga belum menghasilkan pelaporan yang akurat, valid dan efektif secara sistem, untuk mengontrol tersebut masih menggunakan *backup* data manual. Penelitian ini menunjukkan tujuan yang telah dicapai yaitu mempermudah integrasi terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan, walaupun dalam penerapannya mengalami kendala atau hambatan dikarenakan fitur-fitur yang belum lengkap dan adaptasi sistem baru membutuhkan waktu dan pelatihan, untuk memastikan seluruh tujuan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan. Tetapi secara keseluruhan, SIPD memiliki dampak yang positif dikarenakan mempermudah menginput, mengakses, dan mengolah data keuangan daerah. SIPD cukup mudah dalam aksesibilitasnya karena memang hanya perlu membuka pada situs saja sehingga dapat mudah diakses dari berbagai perangkat yang memiliki koneksi pada internet.

Pembahasan

Dari sisi konteks, Temuan ini, sejalan dengan Agnes Dkk (2019) yang juga menemukan kurangnya integrasi sistem dan sinkronisasi antara SIMDA Keuangan, SIMDA Pendapatan dan Bank SulutGo. SIPD hadir untuk memastikan seluruh data keuangan daerah dapat diakses secara real-time dan terintegrasi dalam satu sistem nasional.

Terbatasnya SDM yang memiliki keahlian dan pemahaman dalam penggunaan SIPD sebagaimana yang terjadi di BPKAD Kab Buton sama dengan yang juga menjadi kendala dalam penyusunan APBD di Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao sebagaimana dijelaskan Nalle. (2023). Walaupun hal ini juga berkaitan dengan tupoksi dan pembagian tugas setiap staf agar tidak terjadi double work yang bisa berakibat pekerjaan yang dilakukan tidak maksimal dan mengalami keterlambatan. Masalah seperti ini juga dijelaskan Amelia (2023) yang mengungkapkan belum adanya pelatihan dan bimbingan teknis lanjutan dalam pengoperasian SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Namun parahnya disana, belum adanya bimbingan teknis (Bimtek) dan pelatihan yang berkelanjutan sehingga Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh belum dapat mengoperasikan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan keuangan, penatausahaan keuangan hingga pelaporan keuangan. Sutriyono (2021) juga menyatakan peningkatan sumberdaya manusia dalam penerapan SIPD pengelolaan keuangan Tim SIPD Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Temuan peneliti bahwa sarana dan prasarana seperti komputer atau laptop belum terpenuhi, karena sebagian staf masih menggunakan laptop pribadi dalam menginput SIPD. Memang, terdapat laptop dan komputer sebanyak 74 unit namun sebagian tidak berfungsi dengan baik (rusak). Jaringan internet juga sering bermasalah. Kenyataan ini sama dengan temuan Setia Budi, (2023)) dalam implementasi SIPD di Jeneponto yang menemukan terbatasnya sarana dan prasarana adalah juga menjadi hambatan yang terjadi di Kabupaten Jeneponto dalam menjalankan pekerjaan mengenai dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sehingga dalam melaksanakan penerapan sistem informasi pemerintahan daerah mengalami keterlambatan. Putri et al. (2025) juga menemukan faktor yang turut menghambat penerapan SIPD yakni terbatasnya anggaran yang tersedia untuk mendukung pembaruan infrastruktur dan pelatihan sumber daya manusia (SDM).

Dengan hambatan dalam SIPD membuat BPKAD harus melakukan konsultasi dan koordinasi ke pusdatin untuk mengatasi berbagai masalah. Hasil berkaitan ketepatan waktu ini berbeda dengan temuan Iqbal dkk (2021) yang menjelaskan ketepatan waktu dengan hadirnya SIPD membuat perencanaan semakin efektif. Begitupula temuan Balqis dan Nadya, (2021) juga menjelaskan dilihat dari segi waktu SIPD yang diterapkan oleh Dinas Transmigrasi serta Tenaga Kerja menciptakan informasi

data yang lebih baik dan cepat. Tumija (2023) juga menunjukkan bahwa implementasi SIPD dalam perencanaan anggaran daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) sudah berjalan dengan baik. hal tersebut dibuktikan dengan manfaat yang dirasakan oleh Pemerintah Daerah dalam perencanaan anggaran

Dalam aspek proses terdapat monitoring pada BKAD, untuk pengawasan dilakukan oleh Inspektorat sedangkan evaluasi oleh BPK dan BPKP sehingga dibutuhkan mekanisme pengawasan yang konsisten terhadap penggunaan SIPD. Monitoring juga dilakukan oleh tim teknis internal dan Kemendagri. Pemerintah daerah harus menyelenggarakan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas sistem serta menerima masukan dari pengguna untuk penyempurnaan fitur. Evaluasi berkala penting untuk mengukur efektivitas dan menentukan perbaikan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Amelia, 2023) yang mengatakan evaluasi berkala terhadap penerapan SIPD juga diperlukan untuk memastikan sistem ini tetap relevan dengan kebutuhan pelaporan keuangan yang dinamis. Evaluasi ini dapat mencakup tinjauan terhadap kinerja sistem, tingkat kepuasan pengguna, serta identifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Terkait produk, fakta di BPKAD Kabupaten Buton beririsan dengan temuan Nalle & Sandorio (2023) yang menyatakan efektivitas aplikasi SIPD dalam penyusunan APBD pada Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao dalam penyusunan APBD menggunakan aplikasi SIPD belum berjalan dengan baik atau bisa dikatakan belum efektif dan efisien, walaupun dalam penerapan sistem ini dirancangkan oleh pemerintah pusat untuk memudahkan serta mempercepat pekerjaan. Nidya (2022) juga menyatakan hal demikian yakni implementasi SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru bermasalah dimana implementator yang kurang mendukung dalam penerapan kebijakan mempengaruhi implementasi SIPD.

SIPD untuk bagian pelaporan memiliki fitur baru pada pertengahan tahun 2024, sehingga terdapat beberapa fitur yang belum dipahami secara mendalam walapun sudah diberikan modul. Dalam aspek keamanan, SIPD dilengkapi dengan mekanisme yang aman dan kami merasa cukup terjamin dengan hal tersebut. Hal ini sama juga dengan penjelasan Afifah, S. N., Subarno, A., and Akbarini, (2023). Dimana dalam penggunaannya, aplikasi SIPD masih memiliki beberapa kekurangan yang menjadi penghambat dalam efektivitas kinerja pemerintah daerah. Implementasi SIPD perlu terus ditingkatkan, mengingat pentingnya aplikasi SIPD untuk meningkatkan akurasi, validasi dan transparansi penatausahaan keuangan sekaligus menghindari bahaya terjadinya moral hazard dalam pengelolaan keuangan pemerintah (Abidin, 2021)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari sisi konteks, sebelum SIPD, BPKAD Kabupaten Buton menggunakan SIMDA. Namun SIMDA memiliki kelemahan masih menggunakan platform dekstop/offline yang menyebabkan sering terjadinya kesulitan dalam pertukaran file ataupun import-ekspor data. Pada aspek input (masukan), penerapan SIPD belum maksimal dikarenakan kurangnya pemahaman sebagian pegawai (SDM) yang mengoperasikan aplikasi SIPD.

Pada aspek proses, pelaporan keuangan di BKAD belum sesuai rencana dan mengacu pada SOP, ini karena belum seluruh tahapan diterapkan secara konsisten, terutama dalam hal validasi lintas OPD, ketepatan waktu input, dan pemanfaatan penuh fitur SIPD. Pada aspek produk, dalam proses pencatatan, pembukuan hingga pelaporan telah menunjukkan kemajuan namun masih banyak hambatan yakni terdapat eror sistem, duplikat data keuangan, sehingga belum menghasilkan pelaporan yang akurat, valid dan efektif secara sistem

Saran

Perlu meningkatkan efektivitas SIPD agar kinerja pelaporan keuangan meningkat. Pada aspek input, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pemahaman dan kapasitas sebagian pegawai (SDM) yang mengoperasikan aplikasi SIPD. Meningkatkan Sarana dan prasarana seperti komputer atau laptop serta kapasitas jaringan internet. Pemerintah Daerah juga mesti meningkatkan alokasi anggaran khususnya untuk bimbingan teknis terkait SIPD.

Pada aspek proses pelaporan keuangan di BPKAD harus menyesuaikan dengan rencana dan mengacu pada SOP secara keseluruhan dan meningkatkan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan. Pada aspek produk, perlu mengatasi hambatan yakni terdapat eror sistem, duplikat data keuangan, sehingga ke depan menghasilkan pelaporan yang lebih akurat, valid dan efektif secara sistem.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2021). Sistem Informasi Dalam Hubungan Prinsipal - Agen Di RSUD Bahteramas Kota Kendari. *MINISTRATE*, 3(1), 76–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jbpd.v3i1.12145>
- Afifah, S. N., Subarno, A., and Akbarini, N. R. (2023). Implementasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, 7(2), 171–178.
- Agnes, K., & Dkk. (2019). Analisis Kendala Pengimplementasian Pendapatan pada SIMDA Keuangan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Goodwill*, 10(2).
- Agustinova, D. E. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Calpulis.
- Amelia, B. (2023a). *Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Efektivitas Pertanggungjawaban Bendahara Di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Amelia, B. (2023b). *Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Efektivitas Pertanggungjawaban Bendahara Di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Program Studi Keuangan Publik*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Arikunto, & Jabar, S. D. C. S. A. (2009). *Evaluasi Program Pendidikan*. Bumi Aksara.
- Asrul, & Saragih, A. H. and M. (2022). *Evaluasi*. Perdana Publishing.
- Balqis, Nadya, Z. F. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distranaker) Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*, 7(2).
- Iqbal, Mahathir Muhammad, Sri Handayani, D. I. S. (2021). Efektivitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 3(2), 173–185.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja. Rosdakarya.
- Nalle., S. (2023). *Efektivitas Aplikasi SIPD Dalam Penyusunan Apbd Pada Badan Keuangan Dan Aset Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Nalle, & Sandorio. (2023). *Efektivitas Aplikasi SIPD Dalam Penyusunan APBD Pada Badan Keuangan Dan Aset Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Nidya, V., & Dkk. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Riau. *DIGIBIS : Digital Business Journal*, 1(1).
- Putranto, R., Andikaputra, F. (2022). Meningkatkan Komitmen bagi Aparatur Sipil Negara: Perspektif teori pertukaran sosial dalam akuntabilitas organisasi publik. *Query*. <https://www.journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/174>
- Putri, Della Ameliya, & Dkk. (2025). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Pelaksanaan Laporan Keuangan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. *Journal of Community Dedication*, 5(1), 110–118.
- Setia Budi, M. E. (2023). *Evaluasi Kualitas Penerapan Aplikasi SIPD Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto*. IPDN.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutriyono, A. (2021). *Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi tentang Penerapan SIPD Pengelolaan Keuangan Daerah*

pada Pemerintah Kabupaten Cilacap. Universitas Jenderal Soedirman.

Tumija, P. dan A. E. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Birokasi*, 5(2), 155–169.